

KEGIATAN TINDAK LANJUT PENGHIMPUNAN DATA, INFORMASI DANA BAGI
HASIL (DBH) SEKTOR PERKEBUNAN (DBH CPO)
Kerjasama Dinas Pendapatan Propinsi Riau dengan Lembaga Penelitian Universitas
Riau, Pekanbaru 2013

Tim Peneliti:
Almasdi Syahza; Suwondo; Djaimi Bakce; Ferry HC Ernaputra; RM Riadi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perkembangan sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan di wilayah Riau sangat cepat sekali. Hal ini lebih banyak disebabkan karena hasil subsektor perkebunan berorientasi ekspor dan memberikan penghasilan yang cukup memadai bagi petani. Di Provinsi Riau, kelapa sawit merupakan komoditas primadona yang banyak diusahakan oleh masyarakat maupun badan usaha. Perkembangan luas areal perkebunan kelapa sawit meningkat secara tajam, yakni 966.786 ha pada tahun 2000 meningkat menjadi 2.258.553 ha pada tahun 2012. Selama periode tahun 2000-2012 tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 8,08% per tahun, sementara komoditas perkebunan lainnya seperti karet dan kelapa justru mengalami penurunan. Perluasan areal perkebunan diikuti dengan peningkatan produksi berupa *Crude Palm Oil* (CPO). Produksi sebesar 1.792.481 ton pada tahun 2000 meningkat menjadi 7.047.221 ton pada tahun 2012 dengan pertumbuhan rerata per tahun sebesar 12,1%. Produksi tersebut didukung oleh pabrik kelapa sawit (PKS) sebanyak 146 unit dengan kapasitas olah sebesar 6.245 ton per jam.

Perkembangan pembangunan perkebunan kelapa sawit telah membawa dampak terhadap perubahan sosial budaya masyarakat di pedesaan. Perubahan tersebut terlihat dari gaya hidup dan pola pertanian yang mereka terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi masyarakat yang berusaha di perkebunan kelapa sawit memperlihatkan tingkat kehidupan ekonomi yang lebih sejahtera dibandingkan dengan masyarakat berusahatani diluar kelapa sawit. Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi di pedesaan terutama antara mereka yang berusahatani kelapa sawit dan yang bukan kelapa sawit. Dari sisi lain kegiatan pembangunan perkebunan telah dapat mengangkat perekonomian masyarakat khususnya mereka yang bermata pencaharian dari sektor pertanian. Dampak dari pembangunan tersebut terlihat dari beberapa indikator, antara lain: 1) Angka *multiplier effect* ekonomi yang diciptakan dari

kegiatan pembangunan perkebunan di pedesaan meningkat; 2) Indek kesejahteraan masyarakat pedesaan sebagai akibat dari pembangunan perkebunan bernilai positif.

Pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit terutama di daerah bagian barat menyebabkan meningkatnya bahaya erosi atau laju erosi aktual. Tahun 2000 menunjukkan bahwa laju erosi potensial terhadap wilayah pengembangan perkebunan kelapa sawit untuk Riau bagian Barat sebesar 29 ton per ha per tahun. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan laju erosi aktual tertimbang sebesar 339 ton/ha/tahun atau masuk dalam kategori kelas bahaya erosi IV (180-480 ton/ha/tahun). Kondisi ini jika terus dibiarkan akan sangat mengancam kelestarian wilayah daerah aliran sungai (DAS) di Propinsi Riau.

Jika diamati perkembangan ekonomi Daerah Riau terutama yang terkait dengan pengembangan sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan, memberikan informasi bahwa aktivitas perkebunan dapat meningkatkan atau memberikan penghasilan yang layak terhadap masyarakat pedesaan. Keadaan tersebut terlihat di daerah pedesaan. Dimana masyarakat yang berusahatani di subsektor perkebunan lebih sejahtera dibandingkan diluar subsektor perkebunan. Namun hal tersebut, berdasarkan pengamatan di lapangan tidak berlaku bagi aktivitas perkebunan kelapa. Petani yang berusaha di komoditas kelapa mengalami penurunan pendapatan. Karena harga komoditas kelapa tidak begitu menjanjikan bagi petani. Justru sekarang terlihat terjadinya pergeseran komoditas dari tanaman kelapa (termasuk karet) menjadi tanaman kelapa sawit. Keadaan tersebut terlihat di beberapa wilayah perkebunan kelapa yakni kabupaten Indragiri Hilir, Bengkalis, Pelalawan, Siak, dan Rokan Hilir.

Khusus bagi daerah atau pedesaan yang tidak melakukan usaha perkebunan kelapa sawit (yang disebabkan kondisi daerah dan lahan) menunjukkan tingkat pendapatan daerah atau pendapatan masyarakat rendah. Akibatnya terjadi ketimpangan pendapatan antara daerah maupun antar masyarakat. Ketimpangan pendapatan antara masyarakat bisa menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat, terutama terkait dengan kepemilikan lahan dan perbedaan ekonomi.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu keberhasilan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di pedesaan. Berkembangnya kelapa sawit telah meningkatkan jumlah uang beredar di daerah pedesaan. Akibat dari semua itu menyebabkan meningkatnya daya beli masyarakat dan berdampak terhadap permintaan barang dan jasa di daerah terutama di pedesaan dan ibukota-ibukota kecamatan. Berkembangnya

kelapa sawit telah menimbulkan tumbuhnya daerah-daerah baru di pedesaan dan berkembang wilayah pedesaan sehingga muncul agropolitan-agropolitas. Secara sinergi aktivitas ini juga meningkatkan ekonomi wilayah yang berdampak terhadap kontribusi PDRB. Sektor pertanian telah memberikan kontribusi yang tinggi terhadap PDRB dibandingkan dengan sektor lainnya.

Aktivitas pembangunan perkebunan memberikan pengaruh eksternal yang bersifat positif atau bermanfaat bagi wilayah sekitarnya. Manfaat kegiatan perkebunan ini terhadap aspek ekonomi pedesaan, antara lain: 1) Memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Kegiatan perkebunan kelapa sawit bukan saja melibatkan petani, melainkan juga melibatkan masyarakat tempatan dalam bentuk aktivitas ekonomi lainnya, seperti industri rumah tangga, usaha perbengkelan, pertukangan, penyediaan bahan bangunan, kedai harian dan kebutuhan lainnya yang mendukung kegiatan ekonomi di pedesaan. Karena tingginya mobilitas penduduk dan mobilitas barang di pedesaan juga telah membuka peluang usaha transportasi desa; 2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Aktivitas perkebunan kelapa sawit telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Konisi ini dapat dilihat melalui pemilikan barang-barang rumah tangga dan sarana transportasi yang dimiliki seperti, motor, mobil; 3) Memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Dari sisi pemanfaatan bagi masyarakat di pedesaan, perusahaan telah membangun jalan usaha antara kawasan perkebunan dengan pabrik kelapa sawit (PKS). Sarana jalan ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga aktivitas masyarakat juga tinggi. Sarana transportasi dan pembangunan jembatan oleh perusahaan perkebunan telah mengurangi daerah terisolir. Aktivitas masyarakat terhadap daerah tetangga juga tinggi.

Perkembangan aktivitas perkebunan kelapa sawit di Daerah Riau juga diikuti oleh peningkatan produksi perkebunan kelapa sawit dan produk turunannya berupa CPO, juga terjadi meningkatkan ekspor CPO. Pada awalnya diberlakukan pungutan ekspor bertujuan untuk menstabilkan harga dan kebutuhan bahan baku dalam negeri. Namun saat ini sudah merupakan salah satu sumber pendapatan negara melalui pungutan pajak ekspor dan bea keluar CPO. Dengan adanya pungutan ekspor CPO yang sekarang dinamakan Bea Keluar CPO (BK CPO) merupakan pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Sampai saat ini masih diberlakukan.

Sejak diberlakukan kebijakan BK CPO, sampai saat ini belum ada ketentuan untuk pembagian hasil bagi daerah penghasil. Tingginya pungutan BK CPO yang diperoleh oleh pemerintah pusat merupakan kecemburuan bagi daerah penghasil. Seharusnya BK CPO yang dipungut oleh pemerintah sebaiknya didistribusikan kembali kepada daerah penghasil CPO dalam bentuk dana bagi hasil (DBH). Jika hal tersebut dilakukan tentu akan dapat dimanfaatkan bagi daerah penghasil untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur sebagai pendukung produktivitas kelapa sawit di daerah penghasil. Dari sisi lain juga dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama yang berada di pedesaan.

Berdasarkan data perkebunan Daerah Riau, Provinsi Riau sebagai daerah penghasil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit memiliki luas lahan 2.258.553 ha dengan tingkat produksi minyak sawit sebesar 7.047.221 ton CPO pada tahun 2012. Propinsi Riau merupakan daerah yang memiliki produksi kelapa sawit tertinggi di Indonesia. Kondisi ini menyebabkan kontribusi Riau terhadap pembangunan ekonomi cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari sumbangan Pajak Ekspor Crude Palm Oil (PE-CPO) sebesar Rp71 triliun ke pemerintah pusat tahun 2010. Bea Keluar (BK CPO) sebesar Rp 3,65 triliun. Tahun 2011 Riau kembali menyumbang melalui BK CPO sebesar Rp 13,00 triliun dan tahun 2012 kontribusi Riau melalui BK CPO sebesar Rp 7,46 triliun.

Besarnya kontribusi Riau tersebut, Pemerintah Daerah Propinsi Riau melalui Dinas Pendapatan Daerah memperjuangkan adanya pembagian yang adil terhadap BK CPO tersebut. Dimana dana tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan daerah dari berbagai aspek, terutama yang terkait dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Paling tidak ada beberapa alasan perlunya DBH perkebunan perlu di perhitungkan untuk dikembalikan ke daerah penghasil guna pembangunan daerah dari berbagai aspek, antara lain: aspek ekonomi, aspek sosial, aspek kesehatan, aspek lingkungan, aspek teknis, aspek penguasaan teknologi dan penelitian.

Dalam usaha pengembangan kelapa sawit dan produk turunannya, maka diperlukan pengembangan sumberdaya manusia (SDM) terutama dibidang penelitian baik di bidang *engineering* dan *manufacturing* teknologi industri hasil kelapa sawit (IHKS). Begitu juga untuk pengembangan dan inovasi masih terbatas. Rendahnya dana riset, kurangnya kolaborasi dan sinergi lembaga research, tidak adanya database jumlah dan kapasitas SDM baik pada

litbang, perguruan tinggi dan perusahaan. Ke depan diperlukan database yang lengkap yang mampu memberikan informasi terkait dengan perkembangan kelapa sawit di Riau.

Seiring dengan pertumbuhan CPO dari tahun ke tahun juga meningkatnya pajak ekspor dan bea keluar (BK) CPO dari Daerah Riau, maka Daerah Riau akan selalu memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara. Namun dari sisi lain sudah sepantasnya pula Daerah Riau sebagai penghasil CPO terbesar di Indonesia memperoleh kembali pembagian dana bagi hasil dari BK CPO. Dimana dana tersebut akan digunakan sebagai pembinaan dan pemeliharaan perkebunan kelapa sawit di Riau. Diharapkan pembagian kembali dana BK CPO tersebut dapat dikembalikan kepada usahatani kelapa sawit sebagai produser guna meningkatkan pendapatan petani dan penghasilan yang lebih besar dimasa yang akan datang.

Target dari kajian ini adalah untuk menyakinkan Pemerintah Pusat terkait dengan BK CPO dari Daerah Riau. Diharapkan pemerintah pusat berkenan mempertimbangkan kembali dana bagi hasil BK CPO untuk daerah penghasil CPO di Indonesia. Dana yang dimaksud oleh daerah penghasil akan digunakan untuk pemberdayaan kelapa sawit ke depan dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi kebun, terutama kebun kelapa sawit rakyat yang mencapai 53% dari total luas kebun yang ada di Riau atau sekitar 1.197.033 ha. Dari luas kebun tersebut sebagian besar merupakan usahatani yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Dari hasil kajian pembagian dana bagi hasil BK CPO oleh pemerintah daerah khususnya akan digunakan untuk keperluan, antara lain: 1) peremajaan kebun kelapa sawit yang sudah mencapai siklus pertama (25 tahun); 2) bantuan pupuk subsidi bagi petani kelapa sawit; 3) penggantian bibit palsu bagi petani swadaya; 4) pencegahan kebakaran kebun; 5) perbaikan jalan produksi di pedesaan; 6) pemberdayaan dan peningkatan kinerja lembaga keuangan petani; 7) pembinaan masyarakat petani dan pencegahan konflik sosial, dan 8) pengembangan inovasi produk kelapa sawit yang terkait dengan industri hulu-hilir melalui penelitian dan pengembangan oleh lembaga dan badan kajian.

Berdasarkan permasalahan dan kendala dalam menghadapi perkembangan perkebunan kelapa sawit ke depan, diharapkan pemerintah pusat mempertimbangkan pembagian dana bagi hasil BK CPO yang akan dimanfaatkan untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan kebun kelapa sawit ke arah yang lebih baik. Untuk itu diperlukan dana yang bersumber dari pembagian hasil BK CPO. Dari hasil kajian dan prediksi sederhana kebutuhan dana yang akan

dimanfaatkan untuk pembangunan dan pembinaan perkebunan kelapa sawit disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Rekapitulasi Rencana Kebutuhan Biaya Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit yang Bersumber dari BK CPO Tahun 2014-2020 (dalam juta)

Tahun	Peremajaan	Pupuk	Penggantian Bibit	Perbaikan Jalan	Penelitian/ Inovasi	Jumlah
2014	3.224.707,62	98.853,85	124.456,28	5.229,26	5.521	3.458.768,39
2015	4.014.632,74	117.208,68	147.564,88	6.665,22	5.935	4.292.007,00
2016	4.976.648,69	138.376,27	174.214,73	8.459,11	6.381	5.304.079,46
2017	6.222.078,88	164.767,23	207.440,76	10.827,86	6.859	6.611.973,94
2018	7.447.081,88	187.815,82	236.458,76	13.268,21	7.374	7.891.998,31
2019	9.568.459,41	229.825,79	289.349,01	17.453,69	7.927	10.113.014,57
2020	10.591.809,44	242.291,18	305.042,85	19.780,38	8.521	11.167.445,01

Pengajuan pembagian dana BK CPO oleh Daerah Riau didasarkan pada rencana pengembangan perkebunan kelapa sawit pada siklus kedua. Pada siklus pertama usaha perkebunan kelapa sawit telah terbukti memberikan dampak ekonomi terhadap ekonomi regional dan wilayah. Tapi dari satu sisi khususnya perkebunan rakyat untuk menghadapi siklus kedua tidak mempersiapkan modal kerjanya. Sehingga ke depan petani tidak punya modal untuk melakukan usahatani pada siklus kedua. Berdasarkan hasil prediksi sederhana dan mengacu kepada luas kebun pada siklus pertama (tahun tanam 1998) maka dibutuhkan dana peremajaan sebesar 3,224 triliun. Disamping itu diperlukan dana untuk pengembangan dan inovasi melalui hasil penelitian. Diharapkan kelapa sawit di Riau ke depan akan berkembang lebih baik dengan mengutamakan keselamatan lingkungan, pengembangan inovasi, penemuan produk-produk turunan yang bernilai ekonomi.